

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Setoran Pajak dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN.Cbi = Responsibility of The Land Titles Registrar against Tax Payment in Making Authentic Deeds Based on District Court of Cibinong's Decision Number 158/Pid.Sus/PN.Cbi

Muhammad Abdoel Aziz, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20515175&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini membahas setoran pajak dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019, TL divonis bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana perpajakan berupa pemalsuan surat setoran PPh dan BPHTB. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan dikarenakan ia mengetahui bahwa PPAT yang mempekerjakan dirinya yakni PPAT MS lalai mengecek surat setoran PPh dan BPHTB yang diserahkan olehnya. Terkhusus untuk PPh, PPAT MS juga lalai mengecek surat setoran PPh yang ia terima telah dilakukan penelitian terhadapnya atau belum. Untuk itu, dalam tesis ini akan dibahas mengenai tanggung jawab PPAT terhadap setoran pajak dalam pembuatan akta otentik dan juga tanggung jawabnya dalam hal tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan studi dokumen melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Metode pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tanggung jawab PPAT terhadap setoran pajak dalam pembuatan akta otentik adalah dalam hal BPHTB PPAT wajib menerima surat setoran pajak sebelum membuat akta otentik. Sedangkan untuk PPh, PPAT juga wajib memastikan bahwasanya telah dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap surat setoran PPh yang diserahkan kepadanya. Apabila seorang PPAT mengabaikannya, maka ia dapat dikenakan sanksi administratif dan dimungkinkan juga untuk dituntut kerugian atas kelalaiannya. Atas kelalaian PPAT MS tidak mengecek apakah surat setoran PPh yang diterima olehnya telah diteliti terlebih dahulu atau belum, maka PPAT MS dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif dan perdata. Pertanggungjawaban secara administratif adalah dengan dikenakan sanksi administratif. Sedangkan pertanggungjawaban secara perdata dalam hal ini dituntut ganti kerugian melalui gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini kemudian memberikan saran agar PPAT senantiasa menjalankan ketentuan yang mengikat dirinya dalam hal menerima surat setoran PPh dan BPHTB dan mengecek surat setoran PPh sudah dilakukan penelitian atau belum. Pengecekan tersebut harus dilakukan karena merupakan tanggung jawabnya dan apabila diabaikan maka ia dapat dikenakan sanks

.....This thesis discusses tax payments in making authentic deeds. Based on the Decision of the Cibinong District Court Number 158 / Pid.Sus / 2019, TL was convicted of being

convicted of a tax crime in the form of forgery of income tax and BPHTB deposits. The criminal act could be committed because he knew that the PPAT who employed him, namely PPAT MS, failed to check the PPh and BPHTB deposit letters that were submitted by him. Particularly for PPh, PPAT MS also neglected to check the income tax deposit that he received had researched on it or not. For this reason, this thesis will discuss the PPAT's responsibility for tax payments in making authentic deeds and also its responsibilities in this regard based on the Cibinong District Court Decision Number 158 / Pid.Sus / 2019.. The research method used in this research is normative juridical, with study through literature for searching secondary data. The analytical approach method that used in this research is qualitative approach. From the research conducted, it is known that the PPAT responsibility for tax payments in making authentic deeds is in the case that BPHTB PPAT is obliged to receive a tax payment letter before making an authentic deed. As for PPh, PPAT is also obliged to ensure that an examination has been made of the PPh deposit letter submitted to him. If a PPAT ignores it, then he can be subject to administrative sanctions and it is also possible to sue for losses for his negligence. For the negligence of PPAT MS not to check whether the PPh deposit letter received by him has been examined or not, then PPAT MS can be held accountable administratively and civil. Administrative responsibility is subject to administrative sanctions. Meanwhile, civil liability, in this case, requires compensation through a claim for default and actions against the law. This research then provides suggestions for PPAT to always carry out the provisions that bind itself in terms of receiving PPh and BPHTB deposit letters and checking the PPh deposit documents whether research has been carried out or not. This check must be carried out because it is his responsibility and if it is ignored, he will be subject to sanctions